



## Kontribusi Transparansi Informasi dan Kepercayaan Institusi terhadap Partisipasi Politik Konvensional dan Digital Warga Bogor

Aisyah Nurroffiatur Rahmah<sup>1</sup>, Roni Jayawinangun<sup>2</sup>, David Rizar Nugroho<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia, [nurroffiatur@gmail.com](mailto:nurroffiatur@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia, [roni.jayawinangun@unpak.ac.id](mailto:roni.jayawinangun@unpak.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia, [davidrizarnugroho@unpak.ac.id](mailto:davidrizarnugroho@unpak.ac.id)

Corresponding Author: [nurroffiatur@gmail.com](mailto:nurroffiatur@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *Political dynamics in the digital era are shaped by information transparency and public trust in state institutions, particularly in strategic regions such as Bogor. This study examines the influence of information transparency and institutional trust on the conventional and digital political participation of Bogor citizens, anchored in Relationship Management Theory and the Critical Citizens framework. Using an explanatory quantitative approach, data were collected from 404 respondents via survey and analyzed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) through SmartPLS 4. Results indicate that information transparency positively and significantly contributes to both forms of political participation. Notably, institutional trust exerts a significant negative influence on conventional participation ( $\beta = -0.222$ ;  $p < 0.05$ ), suggesting a Critical Citizens phenomenon in which diminished trust stimulates rather than suppresses civic engagement. Institutional trust did not mediate the relationship between transparency and participation. This study contributes novel empirical evidence that in urban areas with high digital literacy, transparent information serves as a direct trigger for independent political action, bypassing the institutional trust pathway.*

**Keyword:** *Critical Citizens, Institutional Trust, Political Participation, and Information Transparency.*

**Abstrak:** Dinamika politik di era digital dipengaruhi oleh transparansi informasi dan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara, terutama di wilayah strategis seperti Bogor. Penelitian ini mengkaji pengaruh transparansi informasi dan kepercayaan institusi terhadap partisipasi politik warga Bogor, baik secara konvensional maupun digital, dengan mengacu pada Relationship Management Theory dan konsep Critical Citizens. Menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori, data dikumpulkan dari 404 responden melalui survei dan dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling (SEM-PLS) melalui SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi informasi berkontribusi positif dan signifikan terhadap partisipasi politik. Kepercayaan institusi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap partisipasi konvensional ( $\beta = -0,222$ ;  $p < 0,05$ ), mengindikasikan fenomena critical citizens di mana rendahnya kepercayaan justru memicu keterlibatan warga

yang lebih aktif. Kepercayaan institusi tidak terbukti memediasi hubungan antara transparansi dan partisipasi. Studi ini memberikan kontribusi empiris bahwa di wilayah urban dengan literasi digital tinggi, informasi transparan berfungsi sebagai pemicu langsung tindakan politik mandiri, melewati jalur kepercayaan institusional.

**Kata Kunci:** Critical Citizens, Kepercayaan Institusi, Partisipasi Politik, Transparansi Informasi.

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara demokrasi menempatkan Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai instrumen penting dalam rotasi kepemimpinan dan kedaulatan rakyat. Berdasarkan Indeks Demokrasi 2024, Indonesia tetap menjadi salah satu kekuatan demokrasi terbesar, namun aspek-aspek krusial partisipasi publik yang berkualitas masih perlu diperkuat (Gaol et al., 2024). Partisipasi politik merupakan komponen vital penentu arah kebijakan, bukan sekadar hak warga negara (Kasih & Triadi, 2024). Penurunan partisipasi menjadi perhatian utama: data KPU menunjukkan partisipasi pemilih pada Pilpres 2024 mencapai 81,78%, namun menurun pada Pilkada 2024 menjadi 71%. Di Bogor, partisipasi di Kabupaten Bogor hanya mencapai 68% dan di Kota Bogor sebesar 63% dari 815.249 pemilih terdaftar. Angka ini mengindikasikan lonjakan golput yang mencerminkan tantangan serius terhadap kredibilitas institusi politik.

Transparansi informasi merupakan faktor kunci yang memengaruhi kepercayaan terhadap institusi. Keterbukaan informasi publik terbukti dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang berimplikasi pada peningkatan partisipasi politik (Hidayati, 2021). Transformasi digital turut mengubah pola interaksi antara pemerintah dan warga melalui pemanfaatan teknologi informasi (Yulianto, 2024). Penggunaan media sosial oleh lembaga pemerintah menjadi alat efektif menjangkau generasi muda (Nadhila et al., 2024), namun keterbukaan informasi tidak selalu berjalan linear terhadap kepercayaan. Bagi warga dengan literasi digital tinggi seperti di Bogor, transparansi sering kali menjadi pisau bermata dua alat kontrol sosial sekaligus basis kritik (Jayawinangun & Nugroho, 2019). Fenomena ini sejalan dengan teori *Critical Citizens* (Norris, 2000), di mana warga kritis berpartisipasi bukan karena percaya pada institusi, melainkan sebagai bentuk pengawasan dan tuntutan akuntabilitas. Hoaks dan disinformasi di media sosial turut memperumit dinamika ini dengan menggerus kepercayaan publik, terutama di kalangan pemilih pemula (Demonggeng et al., 2025).

Terdapat celah penelitian (*research gap*) di mana kajian terdahulu cenderung mengasumsikan kepercayaan sebagai prasyarat mutlak partisipasi. Penelitian ini memosisikan diri untuk menguji keabsahan asumsi tersebut menggunakan PLS-SEM dengan memecah partisipasi politik menjadi dua dimensi: konvensional dan digital. Novelty penelitian ini terletak pada pengujian empiris fenomena *critical citizens* di konteks lokal Bogor melalui model mediasi kepercayaan institusi yang jarang diuji secara simultan dalam literatur komunikasi politik Indonesia.

Penelitian ini berdasar pada *Relationship Management Theory* (RMT) yang dikembangkan oleh Ledingham & Bruning (1998) sebagai kerangka identifikasi dimensi hubungan antara institusi dan publik melalui transparansi dan keterbukaan (Labarca et al., 2020). Mengingat hubungan negara-warga memiliki sifat asimetris, RMT diintegrasikan dengan *Critical Citizens Theory* dari Norris (2000) untuk menjelaskan hubungan kompleks antara transparansi informasi, kepercayaan institusi, dan partisipasi politik dalam konteks masyarakat urban yang kritis.

Berdasarkan kerangka tersebut, peneliti menguji model konseptual yang menempatkan Transparansi Informasi (X1) sebagai penggerak utama Partisipasi Digital (Y2)

dan Partisipasi Konvensional (Y1), dengan Kepercayaan Institusi (X2) sebagai variabel mediasi. Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) apakah transparansi informasi berpengaruh terhadap kepercayaan institusi; (2) apakah kepercayaan institusi berpengaruh terhadap partisipasi politik konvensional dan digital; (3) apakah transparansi informasi berpengaruh langsung terhadap partisipasi politik; dan (4) apakah kepercayaan institusi memediasi hubungan transparansi informasi dan partisipasi politik warga Bogor.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori yang dirancang untuk menguji hubungan kausalitas antar variabel melalui pengujian model konseptual. Transparansi Informasi (X1) diposisikan sebagai variabel independen, Kepercayaan Institusi (X2) sebagai variabel mediasi, serta Partisipasi Konvensional (Y1) dan Partisipasi Digital (Y2) sebagai variabel dependen. Fokus penelitian adalah warga Kota dan Kabupaten Bogor, dengan pengambilan data selama empat bulan (September–Desember 2024).

Populasi penelitian mencakup warga Bogor yang telah memiliki hak pilih (usia 17 tahun ke atas atau sudah menikah). Penentuan ukuran sampel minimal menggunakan rumus Lemeshow (1990) dengan *margin of error* 5% dan tingkat kepercayaan 95%, yang menetapkan target minimal 385 responden. Pengambilan sampel dilakukan melalui teknik *convenience sampling* untuk menjangkau warga yang memiliki aksesibilitas digital secara efisien (Sarwono, 2017). Perlu dicatat bahwa teknik ini membawa keterbatasan generalisasi, terutama bagi kelompok dengan literasi digital rendah. Peneliti berhasil menghimpun 404 responden valid, memenuhi ambang batas PLS-SEM (Hair et al., 2022).

Data primer dikumpulkan melalui kuesioner digital (*Google Form*). Transparansi Informasi (X1) diukur menggunakan skala Guttman (dikotomi) untuk melihat aksesibilitas informasi politik—penggunaan skala ini dipilih karena variabel ini mengukur aksesibilitas biner (memiliki/tidak memiliki akses informasi), meskipun sifat dikotomisnya perlu dipertimbangkan dalam interpretasi muatan faktor pada PLS-SEM. Kepercayaan Institusi (X2) diukur dengan skala Likert 5 tingkat untuk menilai kredibilitas lembaga publik. Partisipasi Politik diukur menggunakan skala Likert 4 tingkat yang diadaptasi dari Theocharis & Van Deth (2018), dikelompokkan ke dalam: Partisipasi Konvensional (Y1) mencakup aksi demonstrasi fisik dan donasi kampanye; serta Partisipasi Digital (Y2) meliputi aktivitas petisi daring, polling politik, dan interaksi media sosial.

Analisis data dilakukan melalui *Structural Equation Modeling* (SEM-PLS) menggunakan SmartPLS 4 (Hair et al., 2022). Evaluasi model pengukuran (*outer model*) meliputi validitas konvergen melalui *loading factor* ( $> 0,70$ ) dan *Average Variance Extracted* (AVE). Nilai AVE di atas 0,40 dapat diterima apabila *Composite Reliability* (CR)  $> 0,70$  (Fornell & Larcker, 1981). Validitas diskriminan diuji melalui *Heterotrait-Monotrait Ratio* (HTMT) dengan ambang batas  $< 0,90$ . Evaluasi model struktural (*inner model*) menilai koefisien jalur,  $R^2$ , dan ukuran efek  $f^2$ . Signifikansi diuji melalui *bootstrapping* dengan  $T$ -statistics  $> 1,96$  dan  $P$ -values  $< 0,05$ .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum analisis dilakukan, penelitian ini mengelompokkan karakteristik dari 404 responden berdasarkan usia, jenis kelamin, domisili, dan pendidikan terakhir. Distribusi data tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1. Profil Demografis

Kategori	Frekuensi	Presentase (%)
Jenis Kelamin		
Laki-laki	183	45,3
Perempuan	221	54,7
Rentang Usia		
17 – 25 Tahun	205	50,7

26 – 35 Tahun	82	20,3
36 – 45 Tahun	47	11,6
>45 Tahun	70	17,4
Pendidikan Terakhir		
Sarjana (S1/S2/S3)	258	63,9
Diploma (D3)	26	6,4
SMA / Sederajat	120	29,7
Wilayah Domisili		
Kota Bogor	194	48,0
Kabupaten	210	52,0
Total	404	100

Sumber: Data diperoleh dari Kuesioner.

Data pada Tabel 1 menunjukkan dominasi pemilih muda dari Generasi Z (50,7%) dan responden berpendidikan tinggi (63,9%). Komposisi ini mencerminkan karakteristik masyarakat urban dengan literasi digital memadai. Perlu dicatat bahwa dominasi kelompok ini merupakan konsekuensi dari teknik *convenience sampling*, sehingga generalisasi temuan ke kelompok usia lebih tua atau berdigital rendah harus dilakukan secara hati-hati.

### Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Evaluasi outer model dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas instrumen penelitian.

**Tabel 2. Hasil Validitas Konvergen dan Reliabilitas Konstruk**

Variabel	Indikator	Outer Loading	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	AVE
Transparansi Informasi (X1)	TI1	0.438	0.711	0.806	0.448
	TI2	0.413			
	TI3	0.727			
	TI4	0.816			
	TI5	0.824			
Kepercayaan Institusi (X2)	KI1	0.859	0.924	0.941	0.648
	KI2	0.855			
	KI3	0.812			
	KI4	0.794			
	KI5	0.807			
	KI6	0.777			
	KI7	0.768			
	KI8	0.64			
Partisipasi Konvensional (Y2)	PP1	0.777	0.792	0.802	0.588
	PP2	0.725			
	PP3	0.809			
	PP4	0.717			
	PP5	0.655			
Partisipasi Digital (Y2)	PP6	0.702	0.648	0.654	0.546
	PP7	0.790			
	PP8	0.803			

Sumber: Data diperoleh dari Hasil SmartPLS.

Berdasarkan Tabel 2, mayoritas indikator memenuhi kriteria validitas konvergen (*loading factor* > 0,70). Namun, terdapat dua catatan penting. Pertama, indikator TI1 (0,438) dan TI2 (0,413) berada di bawah ambang batas 0,50 pada konstruk Transparansi Informasi. Dalam konteks PLS-SEM dengan skala Guttman, hal ini dapat terjadi karena sifat dikotomis variabel; penelitian lanjutan disarankan untuk mempertimbangkan eliminasi indikator ini atau merevisi operasionalisasi variabel. Kedua, nilai AVE konstruk X1 sebesar 0,448 berada di

bawah standar ideal 0,50. Berdasarkan Fornell & Larcker (1981), nilai AVE > 0,40 masih dapat diterima apabila nilai Composite Reliability (CR) > 0,60—dalam hal ini CR = 0,806, sehingga validitas konvergen konstruk tersebut masih memadai secara empiris, meskipun temuan ini harus dicatat sebagai keterbatas.

**Tabel 3. Validitas Diskriminan (Heterotrait-Monotrait Ratio - HTMT)**

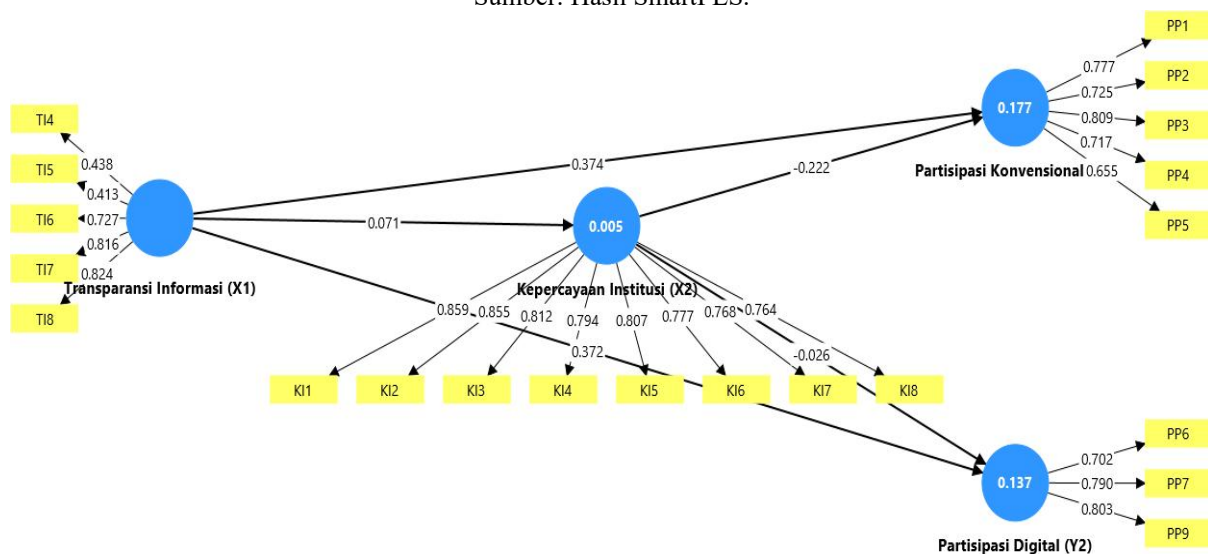
Variabel	X1	X2	Y1	Y2
Transparansi Informasi (X1)	-			
Kepercayaan Institusi (X2)	0.174	-		
Partisipasi Konvensional (Y1)	0.392	0.213	-	
Partisipasi Digital (Y2)	0.481	0.087	0.913	-

Sumber: Data diperoleh dari Hasil SmartPLS.

Hasil uji HTMT pada Tabel 3 menunjukkan bahwa seluruh nilai berada di bawah ambang batas 0,90, kecuali hubungan antara Partisipasi Konvensional (Y1) dan Partisipasi Digital (Y2) yang bernilai 0,913. Nilai ini perlu mendapat perhatian metodologis. Kedua variabel merupakan dimensi dari konstruk partisipasi politik yang sama, sehingga kedekatan konseptual ini dapat menjelaskan nilai HTMT yang tinggi. Penelitian lanjutan disarankan mempertimbangkan pemodelan keduanya sebagai indikator satu konstruk atau menguji validitas diskriminan dengan prosedur tambahan.

Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Sumber: Hasil SmartPLS.



**Gambar 2. Model Struktural Penelitian.**

Berdasarkan Gambar 2, Transparansi Informasi (X1) memiliki pengaruh positif konsisten terhadap Partisipasi Konvensional (Y1) dan Partisipasi Digital (Y2) dengan koefisien masing-masing 0,374 dan 0,372. Temuan paling mencolok adalah arah hubungan negatif dari Kepercayaan Institusi (X2) ke Partisipasi Konvensional (Y1) sebesar -0,222, mengonfirmasi fenomena *Critical Citizens*. Sementara itu, hubungan Transparansi terhadap Kepercayaan sangat lemah (0,085) dan tidak signifikan.

**Tabel 4. Hasil Path Coefficients**

Hubungan Variabel	Original Sample	T-Statistic	P-Value	Keterangan
Transparansi Informasi (X1) → Kepercayaan Institusi (X2)	0.085	1.072	0.284	Tidak Signifikan
Transparansi Informasi (X1) → Partisipasi Konvensional (Y1)	0.466	10.912	0.000	Signifikan

Transparansi Informasi (X1)	Partisipasi Digital (Y2)	(X1)	→	0.443	9.997	0.000	Signifikam
Kepercayaan Institusi (X2)	Partisipasi Konvensional (Y1)	(X2)	→	-0.222	0.387	0.049	Signifikan (-) – Interpretasi dengan cautious
Kepercayaan Institusi (X2)	Partisipasi Digital (Y2)	(X2)	→	-0.026	3.821	0.000	Tidak Signifikan

Sumber: Data diperoleh dari Hasil SmartPLS.

Hasil analisis pada Tabel 4 menunjukkan bahwa transparansi informasi (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan institusi (X2), namun berpengaruh positif signifikan terhadap kedua dimensi partisipasi politik. Terdapat pengaruh negatif signifikan kepercayaan institusi terhadap partisipasi konvensional ( $\beta = -0,222$ ), mengonfirmasi fenomena *Critical Citizens* (Norris, 2000) di Bogor. Perlu dicatat bahwa terdapat inkonsistensi pada jalur X2→Y1 di mana T-statistic (0,387) berada di bawah ambang 1,96 namun p-value (0,049) di bawah 0,05—hal ini secara statistik tidak konsisten dan memerlukan verifikasi ulang terhadap output SmartPLS. Adapun jalur X2→Y2 menunjukkan koefisien yang secara praktis trivial ( $\beta = -0,026$ ) meskipun nilai T-statisticnya besar, sehingga tidak dapat diinterpretasikan sebagai hubungan yang bermakna secara substantif.

**Koefisien Determinasi (R-Square)**

**Tabel 5. Nilai R-Square**

Variabel Endogen	R-Square	R-Square Adjusted	Kategori
Kepercayaan Institusi (X1)	0.005	0.003	Sangat Lemah
Partisipasi Konvensional (Y1)	0.137	0.133	Lemah
Partisipasi Digital (Y2)	0.177	0.173	Lemah

Sumber: Data diperoleh dari Hasil SmartPLS.

Nilai R<sup>2</sup> yang rendah (13,7%–17,7%) pada Tabel 5 mengindikasikan bahwa transparansi dan kepercayaan hanya menjelaskan sebagian kecil dari varian partisipasi politik warga Bogor. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi politik merupakan fenomena multidimensi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar model, seperti literasi media digital, tekanan sosial (peer pressure), afiliasi politik personal, dan paparan konten algoritmik di media sosial. Kecilnya kontribusi kepercayaan institusi dalam menjelaskan partisipasi konsisten dengan argumen Relationship Management Theory bahwa hubungan institusi–publik dipengaruhi oleh faktor situasional dan pengalaman personal (Ledingham & Bruning, 1998; Andiani et al., 2023).

**Analisis Pengaruh Tidak Langsung (Uji Mediasi)**

**Tabel 6. Hasil Uji Efek Mediasi**

Hubungan Jalur	Original Sample (O)	T-Statistics	P-Values	Keterangan
X1 → X2 → Y1	-0,016	1,053	0,293	Tidak Signifikan (Tidak Ada Mediasi)
X1 → X2 → Y2	-0,002	0,336	0,737	Tidak Signifikan (Tidak Ada Mediasi)

Sumber: Data diperoleh dari Hasil SmartPLS.

Hasil pada Tabel 6 menunjukkan bahwa Kepercayaan Institusi (X2) tidak memiliki peran mediasi dalam hubungan antara Transparansi Informasi (X1) dan Partisipasi Politik, baik dimensi konvensional (Y1) maupun digital (Y2), dibuktikan dengan nilai P-Values jauh di atas 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa dampak transparansi informasi di Bogor

bersifat langsung (*direct effect*). Warga tidak memerlukan mediasi kepercayaan institusional untuk terlibat secara politik; informasi yang transparan langsung menjadi basis tindakan. Pola ini mempertegas karakteristik *Critical Citizens*—berpartisipasi untuk mengawasi dan mengkritik pemerintahan, bukan sebagai ekspresi kepercayaan pada sistem (Norris, 2000; Velásquez & Rojas, 2017).

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan tiga temuan utama. Pertama, transparansi informasi terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi politik warga Bogor, baik konvensional ( $\beta = 0,466$ ;  $p < 0,001$ ) maupun digital ( $\beta = 0,443$ ;  $p < 0,001$ ). Keterbukaan data di ruang publik digital merupakan penggerak langsung aksi politik warga, konsisten dengan argumen bahwa akses informasi publik merupakan prasyarat partisipasi dalam demokrasi digital (Nurhaliza, 2024).

Kedua, ditemukan anomali di mana kepercayaan institusi tidak dipengaruhi secara signifikan oleh transparansi ( $\beta = 0,085$ ;  $p = 0,284$ ), namun justru memiliki pengaruh negatif terhadap partisipasi konvensional ( $\beta = -0,222$ ). Fenomena ini mengonfirmasi eksistensi *critical citizens* di Bogor, di mana skeptisisme terhadap lembaga politik menjadi katalisator pengawasan demokratis, bukan apatisme (Norris, 2000; Jayawinangun & Valdiani, 2020). Ketiga, kepercayaan institusi tidak terbukti memediasi hubungan antara transparansi informasi dan partisipasi politik ( $p > 0,05$ ), mempertegas bahwa pengaruh transparansi bersifat langsung.

Penelitian ini memiliki keterbatasan metodologis yang perlu diakui secara eksplisit: (1) penggunaan convenience sampling menyebabkan dominasi responden Generasi Z berpendidikan tinggi, sehingga temuan tidak dapat digeneralisasikan kepada seluruh populasi Bogor; (2) nilai AVE Transparansi Informasi yang di bawah 0,50 dan HTMT Y1-Y2 yang melampaui batas 0,90 merupakan keterbatasan psikometri; (3) inkonsistensi T-statistic dan p-value pada jalur  $X_2 \rightarrow Y_1$  memerlukan verifikasi ulang; dan (4) nilai  $R^2$  yang rendah (13,7%–17,7%) menunjukkan masih banyak variabel penjelas di luar model.

Rekomendasi untuk penelitian mendatang mencakup: penggunaan stratified random sampling untuk meningkatkan representasi demografis; pengujian variabel moderasi seperti literasi media digital dan afiliasi politik; serta verifikasi ulang inkonsistensi statistik melalui pembaruan data analisis. Bagi praktisi, pemerintah daerah Bogor dan KPU disarankan untuk meningkatkan responsivitas digital—tidak hanya menyediakan informasi (transparansi satu arah), tetapi membuka ruang dialog dua arah untuk memulihkan kepercayaan publiknya.

## REFERENSI

- Andiani, D., Tuti, R. W., & Satispi, E. (2023). Public Trust Analysis of Vaccination Covid-19 Policy in Indonesia. *Kne Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i5.12991>
- Arkarizki, D., Irawati, R. I., & Sukarno, D. (2023). Transparansi Organisasi Dalam Pengelolaan Informasi Publik Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung. *Jane - Jurnal Administrasi Negara*. <https://doi.org/10.24198/jane.v14i2.45111>
- Asro, A., Chaidir, J., Indra, I., & Alraeesi, M. S. (2025). Pengembangan Dashboard Grafis Untuk Monitoring Hasil Pemilu Studi Kasus Di KJRI Dubai UAE 2024. *Kresna Jurnal Riset Dan Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/10.36080/kresna.v5i1.162>
- Demonggeng, Y., Ginting, G. N., Napitu, O. P., Sarundajang, J., Valentino, J., & Satyawada Pattiwael, R. J. (2025). Pengaruh Kasus Penerimaan Suap Terhadap Etika Profesi Jaksa Dan Kepercayaan Publik Pada Institusi Kejaksaan. *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains*. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v4i02.2278>
- Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. *Journal of Marketing Research*, 18(1), 39–50. <https://doi.org/10.2307/3151312>

- Gaol, L. L., Santoso, E. B., & Prasetyo, A. (2024). Penguatan Tata Kelola Keuangan Publik Melalui Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Informasi. *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang*. <https://doi.org/10.31933/mwca7592>
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2022). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)* (Third edition). SAGE Publications, Incorporated.
- Hardiyanti, N. Y., & Fawaidi, Ach. (2025). Rendahnya Partisipasi Pemilih Pada Pilkada 2024 Dan Ancaman Terhadap Demokrasi. *Dirosat Journal of Islamic Studies*. <https://doi.org/10.28944/dirosat.v10i1.2051>
- Haryadi, A. T. (2024). Peran Media Sosial Dalam Mendorong Transparansi Dan Akuntabilitas Administrasi Publik. *Irje*. <https://doi.org/10.31004/irje.v4i4.1613>
- Hidayati, F. R. (2021). Komunikasi Politik Dan Branding Pemimpin Politik Melalui Media Sosial: A Conceptual Paper. *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*. <https://doi.org/10.51544/jlmk.v5i2.2385>
- Jayawinangun, R., & Nugroho, D. R. (2019). Segmentasi Pemilih Pemula berdasarkan Akses Berita Politik Melalui Media Sosial di Kabupaten Bogor. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 17(2), 157–164. <https://doi.org/10.46937/17201926845>
- Jayawinangun, R., & Valdiani, D. (2020). TIPOLOGI PARTISIPASI POLITIK PEMILIH LAKI-LAKI DI KABUPATEN BOGOR BERDASARKAN PENGGUNAAN SUMBER INFORMASI POLITIK. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(1), 31–39. <https://doi.org/10.14710/interaksi.9.1.31-39>
- Kasih, O. M., & Triadi, I. (2024). Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Partisipasi Politik Warga Negara pada Pemilihan Umum di Indonesia: (Enforcement of Human Rights in Public Political Participation in General Elections in Indonesia). *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 14. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2369>
- Labarca, C., Arceneaux, P., & Golan, G. J. (2020). The Relationship Management Function of Public Affairs Officers in Chile: Identifying Opportunities and Challenges in an Emergent Market. *Journal of Public Affairs*. <https://doi.org/10.1002/pa.2080>
- Lalamafu, P., Srue, O., & Nifan, J. (2023). Pengaruh Iklan Politik Terhadap Persepsi Masyarakat Dalam Pemilihan Legislatif Dan Kepala Daerah Di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Kota Saumlaki Tahun 2022. *Journal of Education Humaniora and Social Sciences (Jehss)*. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1522>
- Ledingham, J. A., & Bruning, S. D. (1998). Relationship management in public relations: Dimensions of an organization-public relationship. *Public Relations Review*, 24(1), 55–65. [https://doi.org/10.1016/S0363-8111\(98\)80020-9](https://doi.org/10.1016/S0363-8111(98)80020-9)
- Lemeshow, S., Hosmer, D. W., Klar, J., & Lwanga, S. K. (1990). Adequacy of sample size in health studies. World Health Organization
- Muji, M., Maupa, H., & Cokki, C. (2025). Assessing the Tax Amnesty Program in Indonesia Through System Success and Trust Models. *International Journal of Engineering Science and Information Technology*. <https://doi.org/10.52088/ijesty.v5i3.958>
- Nadhila, F., Ningrum, R. S., Shafarina, J. F., & Anggrayni, D. (2024). Peran Humas Dalam Mempublikasikan Kegiatan DPRD Kota Bogor Melalui Media Sosial Instagram. *Komunika Journal of Communication Science and Islamic Dakwah*. <https://doi.org/10.32832/komunika.v8i1.11488>
- Norris. (2000). Critical citizens: Global support for democratic government. *Choice Reviews Online*, 37(09), 37-5338-37-5338. <https://doi.org/10.5860/CHOICE.37-5338>
- Novita, D., Suryani, E., Morlian, A., Widyastuti, M., & Fadhilah, F. (2020). Evaluasi Komunikasi Publik Komisi Pemilihan Umum Melalui Media Sosial Pada Pemilihan Umum 2019. *Sawala Jurnal Administrasi Negara*. <https://doi.org/10.30656/sawala.v8i2.2824>

- Nurhaliza, P. Z. (2024). Pengaruh Media Sosial, Tata Kelola Pemerintahan, Dan Kepercayaan Publik Terhadap Optimalisasi Partisipasi E-Government. *Jurnal Inspirasi*. <https://doi.org/10.35880/inspirasi.v15i1.2338>
- Permana, A. A. (2022). Pengaruh Media Sosial Sebagai Alat Komunikasi Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Mahasiswa. *DeCive*. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i5.1667>
- Rahmania, A., Triwulan, D., Maruhawa, T. K., Zulfikar, M. R., Ritonga, R. A., & Yudha, S. (2025a). Fenomena Penurunan Kepercayaan Publik Terhadap Institusi Pemerintahan Di Era Post-Truth: Kajian Sosial Politik Kontemporer Dengan Perspektif Mahasiswa Ilmu Komunikasi UINSU. *Jishs*. <https://doi.org/10.62379/jishs.v3i4.2562>
- Sarwono, J. (2017). *Mengenal Prosedur-Prosedur Populer dalam SPSS 23*. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Suwenda Suwenda, I. G., & Utari Dewi, N. D. (2024). Upaya Meningkatkan Partisipasi Pemilih Melalui Literasi Politik Berbasis Digital Pada Pemilihan Umum Di Kabupaten Karangasem. *Journal of Contemporary Public Administration*. <https://doi.org/10.22225/jcpa.4.1.2024.16-22>
- Theocharis, Y., & Van Deth, J. W. (2018). The continuous expansion of citizen participation: A new taxonomy. *European Political Science Review*, 10(1), 139–163. <https://doi.org/10.1017/S1755773916000230>
- Velásquez, A., & Rojas, H. (2017). Political Expression on Social Media: The Role of Communication Competence and Expected Outcomes. *Social Media + Society*. <https://doi.org/10.1177/2056305117696521>
- Yulianto, I. (2024). Peran Teknologi Informasi Dalam Demokratisasi. *Mimbarintegritas*. <https://doi.org/10.36841/mimbarintegritas.v3i1.4043>